



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GAMALIS**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **92522**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.804.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 675 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 3.801.000.000
2. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 601.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 2.801.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 537 m2/1 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 601.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 278.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 123.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, BENELLI BS 250 PE MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.400.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.694.269.302**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 11.176.269.302**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.176.269.302

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.